# BAB II
# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan Perusahaan

Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Departemen Keuangan yang mempunyai tugas penting menghimpun penerimaan Negara dari sektor Pajak yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional.

Awal berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya adalah adanya Kantor inspeksi Keuangan Bandung yang merupakan salah satu dari sekian banyak Kantor Inspeksi Keuangan yang ada di Jawa Barat dengan wilayah kerjanya meliputi Bandung Raya, Tasikmalaya, Garut dan Ciamis. Sedangkan wilayah Tasikmalaya, Garut dan Ciamis merupakan Kantor Dinas Luar dari Inspeksi Keuangan Bandung.

Mengingat luasnya wilayah kerja Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang tidak mingkin lagi dapat menjangkau wilayah yang luas dengan potensi fiskal yang cukup banyak maka Direktorat Jenderal Pajak mengambil kebijakan untuk merubah Kantor Dinas Luar Inspeksi Keuangan Bandung dikarenakan data yang ada dengan potensi fiskal daerah Priangan Timur memungkinkan untuk ditingkatkan statusnya dari Kantor Dinas Luar menjadi Kantor Inspeksi Pajak, sehingga Kantor Dinas Luar Keuangan Bandung dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Tasikmalaya dan Kantor Inspeksi Karawang pada tanggal 15 Mei tahun 1966.

Dengan Surat Keputisan Direktorat Jenderak Pajak Nomor PGW.7-8-50 tanggal 26 Juli 1966 ditetapkan para pegawai yang dimutasikan dari Kantor Inspeksi Keuangan ke Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya, yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Laksana yang dijabat oleh Tan Boeng Liang, dengan Kepala Kantor yang pertama adalah Drs. Kanani (almarhum).

Sekitar tahun 1967 Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Manonjaya (sekarang nama menjadi Jalan Sutisna Senjaya Nomor 154) mulai dibangun. Gedung kantor yang pada waktu dibangun merupakan gedung yang sederhana telah beberapa kali mengalami renovasi dan perbaikan. Seiring berjalannya waktu berangsur-angsur sarana dan prasarana mulai disempurnakan untuk menunjang kinerja pegawai.

Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya ini membawahi antara lain Kantor Dinas Luar II Tasikmalaya di Tasikmalaya, Kantor Dinas Luar II Garut di Garut, dan Kantor Dinas Luar II Ciamis di Ciamis.

Tahun 1982 mulai dibangun Kantor Dinas Luar II Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Pancasila Nomor 29 Tasikmalaya dan berubah nama menjadi Kantor Penyuluhan dan Penggalian Potensi Pajak (KP4).

Mulai bulan Nopember 2002, KP4 tersebut pindah ke kota Banjar menjadi KP4 Banjar (Sekarang ganti nama menjadi KP2KP) yang beralamat di jalan Kamum Nomor 1 Banjar Nomor Telepon 0265-741630 yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak Bandung, Drs. Lishoep Tedjasiswojo.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989 berlaku terhitung September 1989 terjadi perubahan organisasi dari Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perubahan system pemungutan pajak dari *official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Adanya perubahan ini dengan sendirinya membuat fungsi Kantor Pajak berubah dari menginspeksi menjadi melayani Wajib Pajak. Wilayah kerja Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.

Pada tanggal 28 Agustus 2007 seiring adanya modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya mengalami perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya dan terjadi juga perubahan struktur organisasi yang sangat mendasar yaitu struktur organisasi Kanwil berserta KPP diubah sedemikian rupa sehingga mencerminkan prototipe institusi masa depan yang menyelenggarakan administrasi perpajakan secara modern dengan menekankan pada fungsi pelayanan dan pengawasan secara profersional sebagai perwujudan *customer satisfaction* dan *corporate governance*. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : Kep-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroprasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

Perubahan organisasi dengan system administasi modern adalah menyatukan Kantor Pelayaan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karipka).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tasikmalaya dipecah berdasarkan wilayah kerja menjadi 3 kantor yaitu, KPP Pratama Tasikmalaya dengan wilayah kerja kabupaten Tasikmalaya dan kota Tasikmalaya , KPP Pratama Garut dengan wilayah kerja kabupaten Garut dan KPP Pratama Ciamis dengan wilayah kerja Kabupaten Ciamis dan Banjar.

Adapun urutan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Drs. Kanani (Tahun 1966-1968)
2. Drs.Sahuri (Tahun 1968-1971)
3. Drs.Subari Mangkuprawito (Tahun 1971-1974)
4. Drs. H.M. Ishak Ayub (Tahun 1974-1977)
5. Drs. Soemantor (Tahun 1977-1980)
6. Drs. Noerbasarota (Tahun 1980-1983)
7. Drs. Moch. Soechri Sasmitho (Tahun 1983-1985)
8. Drs. La Ode Aki (Tahun 1985-1987)
9. Drs. Soediharto (Tahun 1987-1989)
10. Drs. Henky Kailola (Tahun 1989-1992)
11. Drs. Djudju Djunaedi (Tahun 1992-1995)
12. Drs. M. Hidajat Sasmitadipraja (Tahun 1995-1998)
13. S. Soedarmadji, S.H (Tahun 1998-2000)

14. Drs. Zainuddin Lubis, Ak. Msi. (Tahun 2000-2002)
15. Drs.Abdul Rachman, M.M (Tahun 2002-2004)
16. Drs. Achmad Sobari (Tahun 2004-2005)
17. Drs.Herman (Kabid PPh Kanwil Jabar) (Tahun 2005-2006)
18. Drs. Samun Subrata (Kepala KP. PBB Tasikmalaya) Keduanya diangkat menjadi Pemangku Jabatan Sementara (Pjs.)KPP Tasikmalaya (Tahun 2006-2008)
19. Drs. Rusman Manik, Ak. MSc. (Tahun 2008-2009)
20. Drs. Pamudji, M.M (Tahun 2008-2009)
21. Ir. Dadang Karna Permana, M. Si (Tahun 2009-2010)
22. Drs.Menas Mnuhuruk (Tahun 2010-2011)
23. Ir. Dadang Karna Permana, Msi (Tahun 2011-sekarang)

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan bahwa Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Model Lama seperti KPP Tasikamalay, dipimpin oleh seorang kepala Kantor yang dibagi atas beberapa seksi yaitu :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum

3. Sekti Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Tata Usaha Perpajakan
5. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
6. Seksi Pajak Penghasilan Badan
7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
8. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak langsung lainnya.
9. Seksi penagihan
10. Seksi penerimaan dan keberatan
11. Kelompok Jabatan fungsional

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:579/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-112/PJ./2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat mulai beroprasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I. Kanwil DJP Jawa barat II, memutuskan susunan organisasi KPP Pratama, Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menerapkan sistem modern yaitu adalah gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak(KPP) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karipka) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KP.PBB) seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya, dipimpin oleh seorangan Kepala Kantor, yang membawahi beberapa seksi yaitu :

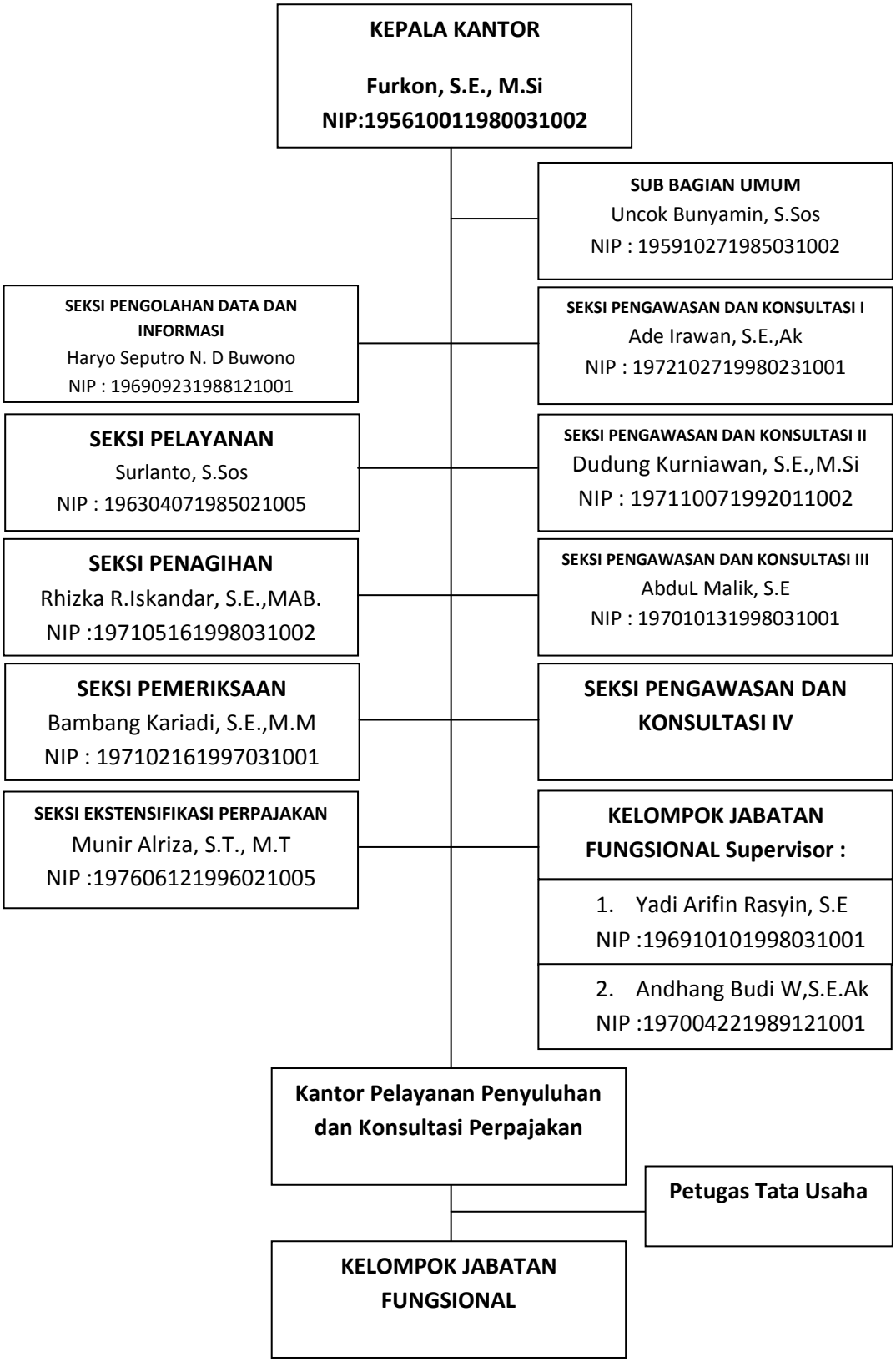
1. Kepala Kantor

2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
9. Seksi Pemeriksaan
10. Tenaga Fungsional Pemeriksaan

Sedangkan *Account Representative* berada di Seksi Pengawasan dan konsultasi. Ciri-ciri khusus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern :

1. Pengawasan dan penelitian Wajib Pajak di lakukan oleh seorang *Acoount Representative* (AR), yang berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Pemeriksaan Wajib Pajak dilakukan oleh Fungsional Pemeriksaan Pajak
3. Proses pekerjaan yang harus dikerjakan dilakukan melalui *workflow*
4. Para pegawai pada kantor yang sudah melaksanakan modernisasi diawasi dan patus pada kode etik pegawai.

# STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA



## 2.3 Uraian Tugas Perusahaan

1. Kantor pelayanan pajak pratama tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pelayanan-pelayanan dibidang PPH, PPN BM, dan PTLL, dan PBB dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan direktur jenderal pajak.
2. Kantor pelayanan pajak pratama tasikmalaya mempunyai fungsi :
   - Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengalian potensi pajak serta ekstensifikasi wajib pajak.
   - Mengamankan, menggali dan mengelola Negara disektor pajak.

A. Kepala Kantor

Tugas Pokok : Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pkok Kantor Pelayanan Pajak Tasimalaya.

Fungsi :

1. Penetapan kebijakan operasional perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya
2. Pengkoordinasian dan pengendalian organisasi
3. Pembina peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan pelayanan pajak.
4. Penyampaian saran dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah dalam rangka pengendalian keputusan di bidang pelaksanaan pelayanan pajak.

B. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag umum).

Mengelola bidang Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga Kantor/ Dokumen / inventaris kantor Penanggung Jawab Kepala Sub. Bagian Umum

Memiliki tugas dan fungsi :

a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian.
b. Melakukan urusan keuangan.
c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

C. Seksi Pelayanan.

Menerima, meneliti dan merekam surat permohonan dari Wajib Pajak, mencetak permohonan NPWP, melayani Wajib Pajak yang berkaitan dengan permasalah perpajakan Penanggung Jawab Kepala Seksi Pelayanan.

Memiliki tugas dan fungsi :

a. Penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan.
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya.
d. Penyuluhan perpajakan.
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
f. Kerjasama Perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Melakukan perekaman data dan validasi , Penata usahakan laporan PPAT, Perekaman data SPOP / LSPOP )Penanggung Jawab Kepala Seksi Pemgolahan data dan Informasi.

Memilik tugas dan fungsi :

a. Pengumpulan data.
b. Pengolahan data dan validasi.
c. Penyajian Informasi perpajakan.
d. Perekaman dokumen perpajakan.
e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
f. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
g. Pelayanan dukungan teknis computer.
h. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing.*
i. Penyiapan laporan kinerja.

E. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Melakukan bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak, melakukan kunjungan Kerja ke lokasi WP dalam rangka pengawasan / pemutahiran data, membuat Profil Wajib Pajak Penanggung Jawab Kepala Seksi Waskon I, II, dan III.

Memiliki tugas dan fungsi :

a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPH, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya).
b. Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
c. Penyusunan profil Wajib Pajak.
d. Analisis kerja Wajib Pajak.
e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.
f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

F. Seksi Ekstensifikasi

Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan, melaksanakan penelitian pendahuluan pendataan , NJOP PBB Penanggung Jawab Kepala Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan fungsi :

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
b. Pendataan objek pajak dan subjek pajak.
c. Penilaian objek pajak.
d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Seksi Pemeriksaan

Membuat daftar / usulan Pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa,melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan Restitusi,

menyusun konsep surat permintaan kelengkapan data. Penanggung Jawab Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional

Memiliki tugas dan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan.
b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

H. Seksi Penagihan

Menatausahakan surat Ketetapan Pajak, SK.Keberatan , menyampaikan surat Paksa, , himbauan pelunasan Tunggakan Pajak kepada Wajib Penanggung Jawab Kepala Seksi Penagihan.

Memiliki tugas dan fungsi :

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif.
b. Penagihan piutang pajak.
c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak.
d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Kelompok Fungisional

Kelompok ini terdiri atas :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksaan.
b. Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

## 2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanan dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya mempunyai fungsi pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak, mengamankan, menggali dan mengelola Negara dari sektor Pajak.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud diatas, KPP Pratama menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensial perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.
b. Penelitian dan pentausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Wajib Pajak.
c. Pengawasan, pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penataushaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

e. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan Wajib Pajak.

f. Mengeluarkan atau menertibkan surat-surat yang berhubungan dengan perpajakan antara lain :

    a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

    b. Surat Ketetapan Pajak (SKP).

    c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

    d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

    e. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

g. Melakukan penyuluhan terhadap Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak.

h. Melakukan tindakan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan Wajib Pajak dengan tahapan : Surat Teguran, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Pelelangan, dan Surat Paksa.

i. Melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berupa pemeriksaan sederhana lapangan dan pemeriksaan sederhan kantor.